

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Diketahui bahwa ada banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) relevan; (2) andal; (3) dapat dibandingkan; dan (4) dapat dipahami. (Mahmudi, 2016:11)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

2.1.1 Sistem Akuntansi

2.1.2.1 Definisi Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Wikd & Kwok (2011: 4) dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1), definisi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna lapran keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal.”

Definisi akuntansi menurut Mursyidi (2010:17) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan pengeanalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Sedangkan definisi akuntansi menurut Hanafi dan Abdul Halim (2012:27), definisi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (Judgment) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

2.1.2.2 Bidang-bidang Akuntansi

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012:9) jenis-jenis bidang akuntansi antara lain sebagai berikut:

1. Akuntansi Manajemen

Bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan.

2. Akuntansi Biaya

Bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data dan biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.

3. Akuntansi Keuangan

Bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses bidang akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.

4. Auditing

Bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan tersebut, maka disebut

sebagai internal auditor. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan dilakukan oleh di luar perusahaan maka disebut sebagai auditor independen atau akuntansi publik.

5. Akuntansi Pajak

Bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja diatas setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.

6. Sistem Akuntansi

Bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesain dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.

7. Akuntansi Anggaran

Bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan dimasa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendaikan rancana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk

menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

8. Akuntansi Internasional

Bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintas batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara dimana perusahaan multinasional beroperasi.

9. Akuntansi Sektor Publik

Bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan lainnya. Contohnya mencakup pemerintah, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.

2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.2.1 Definisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai pengguna sistem dalam suatu perusahaan atau organisasi dituntut untuk memiliki tingkat keahlian yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan. Menurut Nurani (2013:3), definisi sumber daya manusia adalah sumber daya manusia adalah

keseluruhan orang yang dipekerjakan dalam suatu organisasi, baik lembaga pemerintah maupun organisasi swasta.

Menurut Yani (2012:1) definisi sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

“Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur dalam organisasi yang diartikan sebagai manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia dapat disebut juga sebagai personil, tenaga kerja, mewujudkan eksistensinya atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal modal non material dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan nonfisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.”

Menurut Wirawan (2015:1), definisi sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

“Sumber daya manusia merupakan orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi. Sumber daya manusia merupakan dasar dan kunci dari semua sumber daya organisasi. Sumber-sumber lainnya hanya dapat diperoleh dan berfungsi jika organisasi mempunyai pengetahuan, keterampilan, kompetensi, kewirausahaan dan kesehatan fisik jiwa yang prima, bertalenta, mempunyai etos kerja dan motivasi kerja tinggi yang dapat membuat organisasi berbeda antara sukses atau gagal. Efektivitas dan efisien sumber-sumber organisasi lainnya hanya dapat dicapai kalau sumber daya manusianya berkualitas.”

Dari definisi di atas maka jelaslah bahwa sumber daya manusia adalah orang yang dipekerjakan, tenaga kerja atau pekerja yang bekerja dalam suatu organisasi atau entitas yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan.

2.1.2.2 Aktivitas Sumber Daya Manusia

Faktor utama sumber daya manusia adalah memberikan kontribusi bagi keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Kunci untuk meningkatkan kinerja

organisasi adalah memastikan bahwa kegiatan atau aktivitas sumber daya manusia dilakukan sesuai dengan tujuan suatu perusahaan. Menurut Sedarmayanti (2014:5), ada tujuh aktivitas sumber daya manusia, yaitu:

1. Perencanaan dan analisis sumber daya manusia
2. Peluang pekerjaan yang sama
3. Pengangkatan karyawan
4. Pengembangan sumber daya manusia
5. Kompensasi dan tunjangan
6. Kesehatan
7. Hubungan karyawan dan karyawan/manajemen

Penjelasan aktivitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Analisis Sumber Daya Manusia

Melalui perencanaan sumber daya manusia, pimpinan berusaha mengantisipasi kekuatan yang akan mempengaruhi persediaan dan tuntutan karyawan di masa depan. Memiliki Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) adalah penting, guna memberi informasi akurat dan tepat untuk perencanaan sumber daya manusia. Pentingnya sumber daya manusia dalam daya saing organisasional harus disampaikan juga. Sebagai bagian usaha memperthankan daya saing organisasional, harus ada analisis dan penilaian efektivitas sumber daya manusia. Karyawan harus dimotivasi dengan baik dan bersedia tinggal bersama organisasi selama jangka waktu yang wajar.

2. Peluang Pekerjaan yang Sama

Pemenuhan hukum dan peraturan tentang kesetaraan kesempatan kerja memengaruhi aktivitas sumber daya manusia yang lain dan integral dengan manajemen sumber daya manusia. Contoh: rencana sumber daya manusia strategis harus menjamin ketersediaan perbedaan individu yang memadai untuk memenuhi persyaratan tindak afirmatif.

3. Pengangkatan karyawan

Tujuan pengangkatan karyawan memberikan persediaan yang memadai atas individu yang berkualifikasi untuk mengisi lowongan pekerjaan di organisasi. Dengan mempelajari apa yang dilakukan karyawan, analisis pekerjaan merupakan dasar fungsi pengangkatan karyawan. Deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dapat disiapkan, digunakan ketika merekrut pelamar lowongan pekerjaan. Proses seleksi berhubungan dengan pemilihan individu berkualifikasi untuk mengisi lowongan pekerjaan di organisasi.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dimulai dengan orientasi karyawan baru, pengembangan sumber daya manusia juga meliputi pelatihan keterampilan pekerjaan. Ketika pekerjaan berkembang dan berubah, diperlukan pelatihan ulang yang dilakukan terus menerus untuk menyesuaikan perubahan teknologi. Mendorong pengembangan semua karyawan, termasuk pengawas dan pimpinan, juga penting untuk mempersiapkan organisasi agar dapat menghadapi tantangan

masa depan. Perencanaan karir menyebutkan arah dan aktivitas untuk karyawan, ketika mereka berkembang dalam organisasi, meniali bagaimana karyawan melaksanakan pekerjaan merupakan fokus manajemen kinerja.

5. Kompetensi dan Tunjangan

Kompetensi memberikan penghargaan kepada karyawan atau pelaksana pekerja melalui gaji, intensif, dan tunjangan. Pemberi kerja harus mengembangkan dan memperbaiki sistem upah dan gaji dasar mereka. Program intensif seperti pembagian keuntungan dan penghargaan produktivitas mulai digunakan. Kenaikan yang tepat untuk biaya tunjangan, terutama tunjangan kesehatan, akan terus menjadi masalah utama.

6. Kesehatan

Keselamatan dan keamanan, jaminan atau kesehatan fisik dan mental serta keselamatan karyawan adalah sangat penting. Secara global, berbagai hukum keselamatan dan kesehatan telah menjadikan organisasi menjadi lebih responsif terhadap persoalan kesehatan dan keselamatan. Persoalan tradisional keselamatan fokus pada pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Melalui fokus kesehatan yang lebih luas, manajemen sumber daya manusia membantu karyawan yang mengalami penyalahgunaan obat dan masalah lain melalui program bantuan karyawan dan mempertahankan karyawan yang sebenarnya berkinerja memuaskan, program peningkatan kesehatan menaikkan gaya hidup karyawan yang sehat lebih memuaskan. Keamanan tempat kerja menjadi lebih penting.

7. Hubungan Karayawan dan Karyawan/Manajemen

Hubungan antara pimpinan dengan karyawan harus ditangani secara efektif apanila karyawan organiasi ingin sukses. Apakah karyawan diwakili oleh satu serikat pekerjaan atau tidak, hak karyawan harus disampaikan. Mengembangkan, mengkomunikasikan, dan memperbarui kebijakan dan prosedur sumber daya manusia sangat penting sehingga pimpinan dan karyawan tahu apa yang diharapkan dalam beberapa organiasi hubungan serikat pekerja/manajemen harus disampaikan dengan baik.

2.1.2.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Setiap organisasi apapun bentuknya senantiasa akan berupaya dapat tercapainya tujuan organisasi yang bersangkutan dengan efektif dan efisien. Efisiensi maupun efektivitas organisasi sangat tergantung pada baik buruknya pengembangan sumber daya manusia atau anggota organisasi itu sendiri. Ini berarti bahwa sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut secara proposional harus diberikan latihan dan pendidikan yang sebaik-baiknya. Bahkan harus sesempurna mungkin.

Menurut Doni Juni Priansa (2014:147), pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses dari pendidikan dan pelatihan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Pelatihan

Penjelasan pengembangan sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Berkaitan dengan pengetahuan secara umum. Terdapat dua level utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam pendidikan, yaitu manajer organisasi dan tenaga operasional.

a. Manajer Organisasi (Manajerial)

Pendidikan bagi manajer organisasi ditujukan dengan berfokus pada peningkatan kemampuan pengetahuan manajer serta kemampuan manajer organisasi untuk keterampilan dalam mengambil keputusan.

b. Staf Pegawai (Operasional)

Pendidikan bagi staf pegawai operasional dapat dilakukan melalui pelatihan kerja dan apprenticeship, dimana pendidikan tersebut bertujuan agar dapat meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh organisasi, meningkatkan moral, serta mempromosikan stabilitas dan fleksibilitas organisasi.

2. Pelatihan

Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam mengembangkan pekerjaan tertentu sesuai dengan pekerjaan terakhir yang dimiliki pegawai. Pelatihan juga dilakukan dalam rangka updating pegawai.

2.1.2.4 Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransferkan dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati.

Menurut Lyle Spencer yang dikutip Sudarmanto (2015:46) “Kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul dalam pekerjaan atau situasi.”

Menurut Emilda Ihsanti (2014) mendefinisikan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah “Kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.”

Sedangkan menurut Sutrisno (2010:12) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan.”

Dari beberapa definisi di atas maka dapat penulis jelaskan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki seseorang baik dilihat dari segi keterampilan, perilaku, pengetahuan sehingga seseorang tersebut dapat menjalankan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

2.1.2.5 Komponen Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Spencer dalam Sudarmanto (2015:53) terdapat 5 (lima) komponen Kompetensi, adalah sebagai berikut:

1. Motif (motive), adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan
2. Sifat (traits), adalah karakteristik fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau informasi
3. Konsep diri (self-concept), adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang
4. Pengetahuan (knowledge), adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan suatu hal yang kompleks
5. Keterampilan (skill), adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

Komponen pembentukan kompetensi sumber daya manusia menurut Parulina Hutapea dan Nrianna Thoa (2010) yaitu:

1. Pengetahuan (Knowledge) adalah informasi yang dimiliki seseorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu).
2. Keterampilan (skill) adalah suatu upaya untuk melakukan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan baik dan maksimal.

3. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seseorang pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan.

Menurut Spencer & Spencer yang dikutip oleh Sudarmato (2015:53), mengatakan bahwa konsep diri (self-concept), watak/sifat (traits) dan motif kompetensi lebih tersembunyi (hidden), dalam (depper) dan berbeda pada titik sentral kepribadian seorang juga cenderung sulit untuk dikembangkan dalam program pelatihan da pengembangan. Kompetensi pengetahuan (knowledge competencies) dan keahlian (skill cometencies) cenderung lebih nyata (visible) dan relatif berbeda dipermukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia serta mudah dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Kompetensi dapat dihubungkan dengan kinerja dalam sebuah model alir sebab-akibat yang menunjuk bahwa tujuan, perangai, konsep diri, dan kompetensi pengetahuan yang kemudian mempraktikan kinerja kompetensi mencakup nilai, tindakan dan hasil. Misalnya motivasi untuk berprestasi, keinginan kuat untuk berbuat lebih baik dari pada ukuran baku yang berlaku dan untuk mencapai hasil maksimal, menunjukkan kemungkinan adanya perilaku kewirausahaan, penentuan yujuan, bertanggungjawab atas hasil akhir dan pengambilan risiko yang diperhitungkan.

Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi dan pengertian kompetensi ini dapat kita padukan dengan keterampilan dasar (soft skill),

keterampilan baku (hard skill), keterampilan sosial (social skill), dan keterampilan mental (mental skill). Keterampilan baku (hard skill) mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM; Keterampilan dasar (soft skill) menunjukkan intuisi dan kepekaan SDM; Keterampilan sosial (social skill) menunjukkan dalam hubungan sosial; keterampilan mental (mental skill) menunjukkan ketahanan mental SDM.

2.1.2.6 Faktor-Faktor Pembentuk Kompetensi Sumber Daya Manusia

Semua organisasi tentu menginginkan sumber daya manusia mereka memiliki kompetensi yang unggul dan handal, sehingga mampu mendongkrak kinerja organisasi. Untuk itu diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap faktor-faktor determinan bagi kompetensi. Menurut Zwell dalam Sudarmato (2015:54) terdapat tujuan determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, yakni:

1. Kepercayaan dan nilai

Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap tidak kreatif dan inovatif cenderung tidak berfikir dan bersikap untuk menemukan sesuatu yang baru dan memberikan tantangan bagi dirinya. Kepercayaan dan nilai seseorang dapat diubah, namun hal ini sangat sulit dan memakan waktu yang lama karena nilai dan kepercayaan seringkali telah menjadi karakter, pandangan, atau identitas seseorang. Lingkungan

sosial memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan dan nilai, dan budaya perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap aspek-aspek kompetensi. Kompetensi berakar pada budaya organisasi. Budaya organisasi terbentuk dari aspek nilai dan kepercayaan seseorang.

2. Keahlian/keterampilan

Aspek ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kompetensi, sebagai contoh, public speaking adalah keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikan, dan diperbaiki. Keahlian menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, latihan dan umpan balik. Dengan memperbaiki kemampuan bicara dan keterampilan menulis, seseorang secara tidak langsung juga meningkatkan kecakapan kompetensi komunikasinya. Pengembangan keahlian khusus yang berhubungan dengan kompetensi dapat berdampak pada budaya perusahaan/organisasi dan kompetensi individu.

3. Pengalaman

Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas yang diberikan. Seseorang dengan sejumlah pengalaman tertentu akan lebih mudah mengorganisir orang lain dalam organisasi yang kompleks dengan penguasaan kompetensi manajerialnya yang tinggi dan akan sangat berbeda apabila dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali. akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang menyatu dalam diri

seseorang akan menjadikan orang tersebut memiliki kompetensi yang tidak disadari dalam dirinya, atau akan terbentuk dalam sikap dan perilaku seseorang.

4. Karakteristik personal

Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kompetensi seseorang dalam manajemen konflik dan negosiasi dari orang yang memiliki sifat introvert akan berbeda dengan orang yang memiliki sifat ekstrovert. Karakteristik kepribadian dapat diubah, tetapi cenderung lebih sulit.

5. Motivasi

Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Motivasi merupakan faktor kompetensi yang sangat penting. Motivasi merupakan faktor kompetensi yang cenderung dapat diubah. Dorongan, pengarahan, pengakuan dan perhatian terhadap individu dapat berpengaruh terhadap motivasi seseorang.

6. Isu-isu emosional

Hambatan dan blok-blok emosional sering kali dapat membatasi penguasaan kompetensi. Kekuatan membuat kesalahan, perasaan malu, perasaan tidak suka, selalu berfikir negatif terhadap seseorang, pengalaman masa lalu yang selalu negatif sangat berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi seseorang. Hal-hal tersebut pada dasarnya dapat

diubah dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, melakukan beberapa terapi, melakukan seseorang agar dapat mengatasi hambatan dan blok-blok tersebut.

7. Kapasitas Intelektual

Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Kompetensi tergantung pada kemampuan kognitif, seperti berfikir konseptual dan berfikir analitis antara satu sama lain akan membedakan kompetensi seseorang dalam pengambilan keputusan, kompetensi perencanaan, dan nilai sebagainya.

Tabel 2.1

Tingkat Perbaikan kompetensi

Tingkat Perbaikan	Kompetensi
Mudah diperbaiki	Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja, dll.
Agak sulit diperbaiki	Orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran strategis, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional, dll
Sulit diperbaiki	Inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptual, fleksibilitas, dll

Sumber: Zwell dalam Sudarmanto (2015:57)

2.1.3 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang Diperlukan untuk pengambilan keputusan pada sektor publik pengambilan keputusan pada sektor publik pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial dan politik. Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Menurut Abdul Hakim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:43), definisi sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten,kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan.”

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, definisi sistem pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“sistem akuntansi pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah serangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.”

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6), definisi sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).”

Menurut Mahmudi (2016:19) yang dimaksud dengan Sistem Akuntansi

Keuangan Pemerintah Daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut terhadap tahap-tahap, prosedur, perangkat, peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah”.

Dari pengertian diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

2.1.3.2 Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui ternd posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsistensi pada setiap periode.

Kebijakan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari:

1. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
2. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan
3. Pengungkapan Unsur Laporan Keuangan

Penjelasan kebijakan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dan pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa terkait untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan.
 - b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
2. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

3. Pengungkapan Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan melaporkan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti:

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas beroperasi.
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.

- c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

2.1.3.3 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002, meliputi:

1. Pencatatan
2. Penggolongan dan pengikhtisaran
3. Pelaporan

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pencatatan, sebagai salah satu jenis proses akuntansi, dalam akuntansi keuangan pemerintahan juga terdapat proses pencatatan samapi dengan pelaoran transaksi-tansaksi ekonomi yang terjadi di instansi pemerintah. Dalam melakukan pencatatan akuntansi, sistem akuntansi keuangan pemerintahan telah menerapkan sistem double entry. Sistem double entry disebut juga sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali sehingga membentuk suatu perkiraan dalam dua sisiberlawanan yaitu sisi debet dan kredit secara berpasangan.
2. Penggolongan dan pengikhtisaran transaksi-transaksi, artinya bahwa transaksi-transaksi yang sudah dicatat itu dikelompokkan menurut jenisnya

masing-masing. Misalnya tiap penerimaan dan pengeluaran kas dimasukkan kedalam kelompok kas dan sebagainya, ini berarti bahwa secara berkala semua transaksi yang sudah dikelompokkan pada sebuah daftar tersendiri, yang disebut Neraca Saldo. Kas adanya penjurnalan dan melakukan posting kedalam buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan.

3. Pelaporan, pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.

Menurut Mahmudi (2016:22) Prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah meliputi:

1. “Sistem dan prosedur penerimaan kas
2. Sistem dan prosedur pengeluaran kas
3. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas
4. Sistem dan prosedur akuntansi aset”.

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD.

Penjelasan dari prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim (2013:84) menyatakan bahwa: Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas.

Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi penerimaan kas, terdiri atas:

- a. Surat Keteapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk retribusi atas wajib retribusi.
- b. Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan bendahara penerimaan untuk menyetor penerimaan daerah untuk PPK-SKPD untuk dijadikan dokumen dalam penyelenggaraan dalam akuntansi pada SKPD.
- c. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah.
- d. Non kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas.

Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi pengeluaran kas, terdiri atas:

- a. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan teredainya dana untuk diserap/direalisasi.
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat perintah pencairan dana yang akan diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah.
- c. Kuitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk.
- e. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah

- f. Nota debit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah.

3. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi atau kejadian selain kas. Prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi atau kejadian sebagai berikut:

1. Pengesahan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dana yang merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang/tambahan.
2. Koreksi kesalahan yang merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal yang telah diposting ke buku besar.
3. Penerimaan hibah selain kas yang merupakan penerimaan sumber ekonomi nonkas yang bukan merupakan pelaksanaan APBD, tetapi mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.
4. Pembelian secara kredit yang merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang.
5. Return pembelian kredit yang merupakan pengambilan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas yang merupakan

pemindahtanganan aset tetap kepada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.

6. Penerimaan aset/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas yang merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar-menukar dengan pihak ketiga.

Dokumen (dokumen sumber dan pendukung) yang digunakan pada prosedur selain prosedur selain akuntansi, terdiri atas:

- a. Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dana.
- b. Berita acara penerimaan barang.
- c. Surat keputusan penghapusan barang.
- d. Surat pengiriman barang.
- e. Surat penerimaan barang.
- f. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD/SKPKD).
- g. Berita acara pemusnahan barang.
- h. Berita acara serah terima barang.

4. Prosedur Akuntansi Aset

Prosedur Akuntansi Aset meliputi serangkaian proses, baik manual atau komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai atau digunakan. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai atau digunakan.

Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi aset, terdiri atas:

- a. Berita acara penerimaan barang.
- b. Berita acara serah terima barang.
- c. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

Setelah semua proses diatas dilakukan maka akan dicatat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Pihak-pihak yang memerlukannya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Investor, Kreditot, Donatur, Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah, Rakyat, Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Pusat yang semuanya adaa dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

2.1.3.4 Basis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, kewajiban ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,

pendapatan-LO dan beban, sehingga akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Menurut Mahmudi (2016:64) menyatakan bahwa ada beberapa macam dasar akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Basis kas (Cash Basic)

Basis kas (Cash Basic) menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2. Basis Akrual (Accrual Basic)

Basis Akrual (Accrual Basic) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

3. Basis Kas Modifikasi (Modified Cash Basis)

Menurut butir (12) dan (13) lampiran XXIX (tentang kebijakan akuntansi) Kepmendagri RI Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa:

- a. Basis kas modifikasi merupakan kombinasi dasar akrual.

- b. Transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal) pada saat utang diterima atau dibayar (dasar kas).

Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi. Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4. Basis Akrual Modifikasi (Modified Accrual Basic)

Basis akrual Modifikasi (Modified Accrual Basic) mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Ajaran 2014 merupakan LKPD terakhir yang menggunakan Basis Kas Menuju Akrual karena mulai ajaran 2015 pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah harus menggunakan Basis Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penerapan basis akrual tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual mensyaratkan diterapkannya basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, ekuitas dalam neraca dan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan entitas yang jelas.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan daerah adalah laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.”

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan akuntansi yang ringkas berupa data keuangan dan aktivitas dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuanan, hasil usaha, serta kinerja perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

2.1.4.2 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan pemerintah disebut dengan pengguna laporan keuangan pemerintah. Dalam hal ini, pengguna laporan keuangan pemerintah dapat juga diidentifikasi dengan menelusuri siapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah.

Menurut Abdul Hakim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:9), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

1. Masyarakat
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa.
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.
4. Pemerintah.

2.1.4.3 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayanya kepadanya.

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:12), tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan pengguna sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

Menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintahan
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintahan
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelapor mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.4.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Hakim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:44), setelah Berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports)
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
2. Pelaporan Financial (Financial reports)
 - a. Neraca
 - b. Laporan Operasional (LO)
 - c. Laporan Arus Kas (LAK)
 - d. Laporan Perubahan Ekuita (LPE)
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sementara penjelasan selengkapnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Penjelasan komponen laporan keuangan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Ralisasi Anggaran (LRA)

Laporan Ralisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari pendapatan –LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dan perimbangan dan dana bagi hasil
- d. Pembiayaan (financial) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh terhadap kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diteima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran yang berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberi pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 - c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan segai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masingnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/bendahara umum daerah.
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/bendahara umum daerah.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan-SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.4.5 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas memiliki banyak makna bagi setiap orang hingga pengertian kualitas dapat berbeda, hal tersebut disebabkan karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya. Berikut pengertian kualitas laporan keuangan pemerintah, yaitu:

Menurut Erlina Rasdianto (2013:146), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, dan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengembalian keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

Menurut Mahmudi (2016:13) mendefinisikan laporan keuangan adalah Informasi yang disajikan untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”.

2.1.4.6 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah sebagai berikut:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

Penjelasan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Relevan adalah laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini

dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan yaitu:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatrbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan yang diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Andal adalah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap

fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi yang tersedia menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal

dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang saman. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang baik dari pada kebijakan yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Laporan keuangan yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk para pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.4.7 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Lilis Setyowati (2014), yaitu:

1. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
2. Kompetensi sumber daya manusia
3. Peran internal
4. Good Corporate Governance

Penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengemabilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawabana pemerintah daerah. Sedangkan informasi keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siala yang bekerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.

3. Peran Internal Auditing

Internal Auditing merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal auditing membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan

meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

4. Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan struktur yang oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan dan mengawasi kinerja.

2.1.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian dapat membantu penulis untuk dijadikan sebagai bahan acuan melihat seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang memiliki kesamaan dalam penelitian, yang kemudian dapat diajukan sebagai hipotesis beberapa penelitian yang terkait dengan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan partisipasi pengguna sistem akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Devi Roviyanthe (2011)	“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survey pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya)”	Pada penelitian yang dilakukan terdapat pengaruh positif antarakompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan -Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Variabel Independen: Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah	-Perbedaan terdapat pada tempat penelitian, pada penelitian terdahulu dilakukan pada OPD kabupaten Tasikmalaya -Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2011
2	Nurillah As Syifa Dan Dul Muid (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi	Kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Variabel Independen: kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	-Dalam penelitian kali ini tidak terdapat variabel independen pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern -Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada SKPD Kota Depok -Penelitian dilakukan pada tahun

		Empiris pada SKPD Kota Depok)			2014 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2017
3	Luh Kadek Sri Megawati , Ni Luh Gede Erni Sulindawati, edy Sujana (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng)	Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Variabel Independen: Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia Variabel dependen: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Variabel Independen: Pengelolaan keuangan daerah Tempat Penelitian: Studi Empiris pada tiga Dinas Kabupaten Buleleng
4	T. Asri Yunita (2015)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kota Dumai)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel independen: Kompetensi Staf Akuntansi	Variabel independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan , sistem pengendalian internal Tempat Penelitian: Studi pada SKPD Kota Dumai

5	Harnoni (2016)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Kepulauan Anambas)	Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Variabel Independen: Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	-Pada penelitian kali ini tidak terdapat variabel independen teknologi informasi dan pengendalian intern -Pada penelitian terdahulu dilakukan pada SKPD Kabupaten Kepulauan Anambas -Pada penelitian terdahulu dilakukan ada tahun 2016 dan penelitian kali ini dilakukan pada tahun 2017
6	Kadek Desiana Wati (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah		Variabel Independen: Kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan	-Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2014 -Penelitian terdahulu dilakukan pada SKPD Kabupaten Buleleng
7	Komalasarini (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan	Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah	Variabel Independen: Penerapan Sistem Akuntansi	-Terdapat perbedaan pada variabel independen sistem

		Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada DPPKAD Kabupaten Subang)	berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan	Keuangan Daerah Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan	pengendalian intern pemerintah -Penelitian terdahulu dilakukan pada SKPD Subang -Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016
8	Synthiaa (2016)	<i>The Effect of Human Resources Competence and Application of Regional Financial Accounting Systems on Quality of Financial Report</i>	<i>Application of Standards Accounting Government, system internal control and staff competence financial basis partial effect towards quality financial statements regional government</i>	Variabel Independen: <i>The Effect of Human Resources Competence and Application of Regional Financial Accounting</i> Variabel Dependen: <i>Quality of Financial Report</i>	-Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016 -Penelitian terdahulu dilakukan pada SKPD Kabupaten
9	Yusar Sagara (2015)	<i>The Effect of Implementation Accounting Information System and Competence of Human Resources on the Quality of Financial Reporting</i>	<i>Qualitative characteristics of financial statements in accordance with Government Regulation Number. 71 Year 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP) is a normative measures that need to be realized in the accounting information so that it</i>	Variabel Independen: <i>Competence of Human Resources</i> Variabel Dependen: <i>Quality of Financial Reporting</i>	<i>Implementation on Accounting Information System</i> -Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016 -Penelitian terdahulu dilakukan pada SKPD Kabupaten

			<p><i>can fulfill its purpose. The following four characteristics is a prerequisite normative necessary for the financial statements of local governments to meet the desired quality, namely (1) relevant, (2) reliability, (3) comparability (4) understandable.</i></p>		
--	--	--	--	--	--

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

2.2 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi Informasi keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. selain itu, hal yang mendasar dan penting dai penerpan akuntansi didalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi.

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Maanusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kapasitas sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemerintah untuk mencapai tujuan kualitas laporan keuangan. Kompetensi

sumber daya manusia dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan. Sehingga sumber daya manusia sangat berperan penting dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan pun akan meningkat.

Menurut Azhar Susanto (2013:41) menyatakan bahwa:

“Manusia merupakan unsur yang sangat dominan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. Dikatakan dominan karena hanya bagian kecil peran yang dapat dilakukan oleh alat untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Misalnya suatu alat tidak dapat mengatakan bahwa informasi ini lengkap atau tidak. Alat juga tidak bisa mengatakan bahwa informasi yang relevan atau tidak. Alat bisa membantu mempercepat dan meningkatkan akurasi suatu informasi dengan catatan kalau manusia memasukkan data dengan benar dan cepat. Apakah data yang dimasukkan itu benar atau tidak, alat tidak memberikan penilaian.”

Menurut Husna (2013) dalam Rizal Pramudiarta (2014), menyatakan bahwa:

“Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman pada bidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kompetensi sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas (andal). Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak kompeten dan kapasitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitas menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan.”

Liza Rahayu & Yuneita Anisma (2014) menyatakan:

“Jika kompetensi Sumber Daya Manusia tidak sesuai dengan pendidikannya diluar akuntansi, maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga, kualitas laporan keuangan tersebut menjadi tidak akurat karena tidak dikelola oleh SDM yang berlatarbelakang pendidikan

akuntansi, untuk kedepannya agar kualitas laporan keuangan daerah tersebut menjadi lebih akurat, efektif, dan efisien harus ditata ulang kembali manajemennya dengan SDM yang ahli dalam bidangnya yaitu lebih mengutamakan aparat-aparata pemerintah yang berlatar belakang akuntansi.

Sugandhi (2013) menyatakan:

“Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya yang memang memiliki kapasitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar dan kriteria nilai informasi laporan keuangan yang ditetapkan pemerintah.”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harnoni (2016), hasil penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dilihat bahwa adanya kapasitas sumber daya manusia yang didukung dengan latar pendidikan yang baik maka akan mempermudah dalam pelaksanaan fungsi akuntansi dalam memberikan pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu.

2.2.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi

pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengatakan bahwa pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Diatur dengan peraturan Gubernur/Walikota/Bupati yang mengacu pada pedoman umum yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan laporan keuangan yang berkualitas yang diperlukan publik secara akurat, relevan dan tepat waktu. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2004:34) adalah sebagai berikut:

“Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata masih lemah.”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tutun Hermawanto Botutihe (2013) dengan Judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa dengan penerapan sistem akuntansi

keuangan daerah yang baik maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang baik pula atau sebaliknya.

2.2.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Daerah Terhadap Kualitas Keuangan Daerah

Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kegiatan akuntansi baik di sektor privat atau sektor pemerintah atau public adalah memberikan informasi tentang transaksi dan kinerja keuangan baik kepada pihak internal atau eksternal entitas. Untuk menyediakan informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi (Abdul Halim, 2013:37).

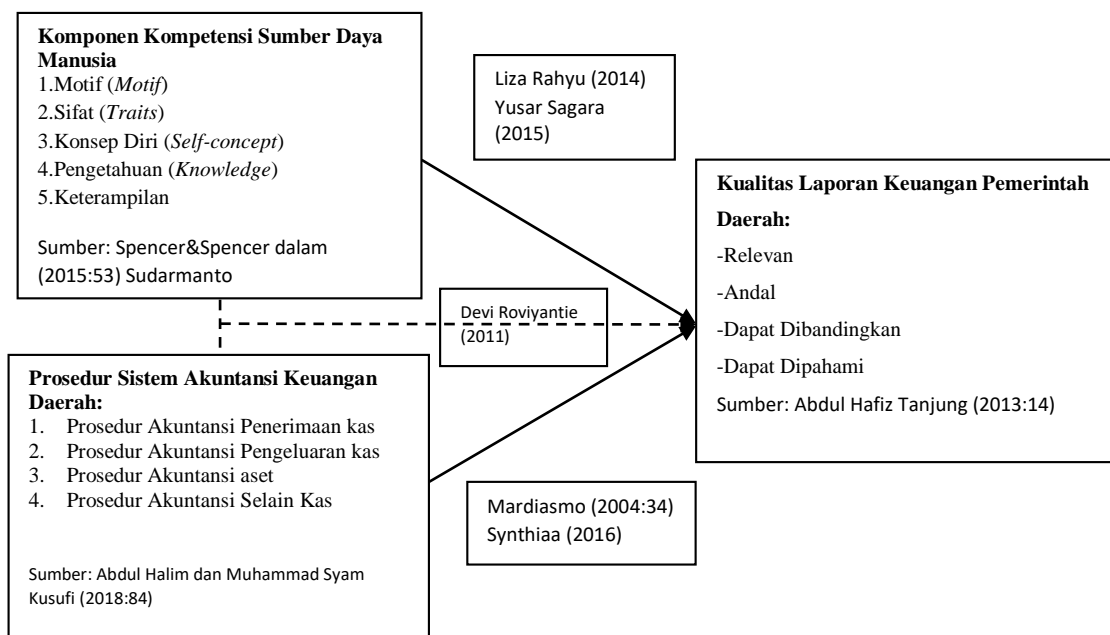
Sistem akuntansi merupakan juga merupakan salah satu bagian dari uraian tugas sumber daya manusia yang ada di sub-bagian keuangan, untuk itu sumber daya manusia tersebut harus mampu dan kompeten sehingga dalam pelaksanaan tugas dilakukan secara profesional, efisien dan efektif. Sesuai dengan penjelasan dari Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2007, yaitu:

“Kemampuan dan Karakteristik yang dimiliki seorang pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.”

Sehingga semakin kompeten sumber daya manusia membuat laporan keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah secara baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkanpun akan semakin baik.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Roviyaniti (2012) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian replika dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Laporan Keuangan Daerah. Maka dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasarn teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan Sebelumnya maka dalam penelitian ini, rmusan hipotesis penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai beikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Kompetensi sumber daya manusia dan penerapam sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.